



DOMAIN 1

SATU DATA INDONESIA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus



01

Satu Data Indonesia (SDI)

02

Prinsip SDI

03

Penyelenggara SDI

04

Indikator Kematangan Penerapan SDI

05

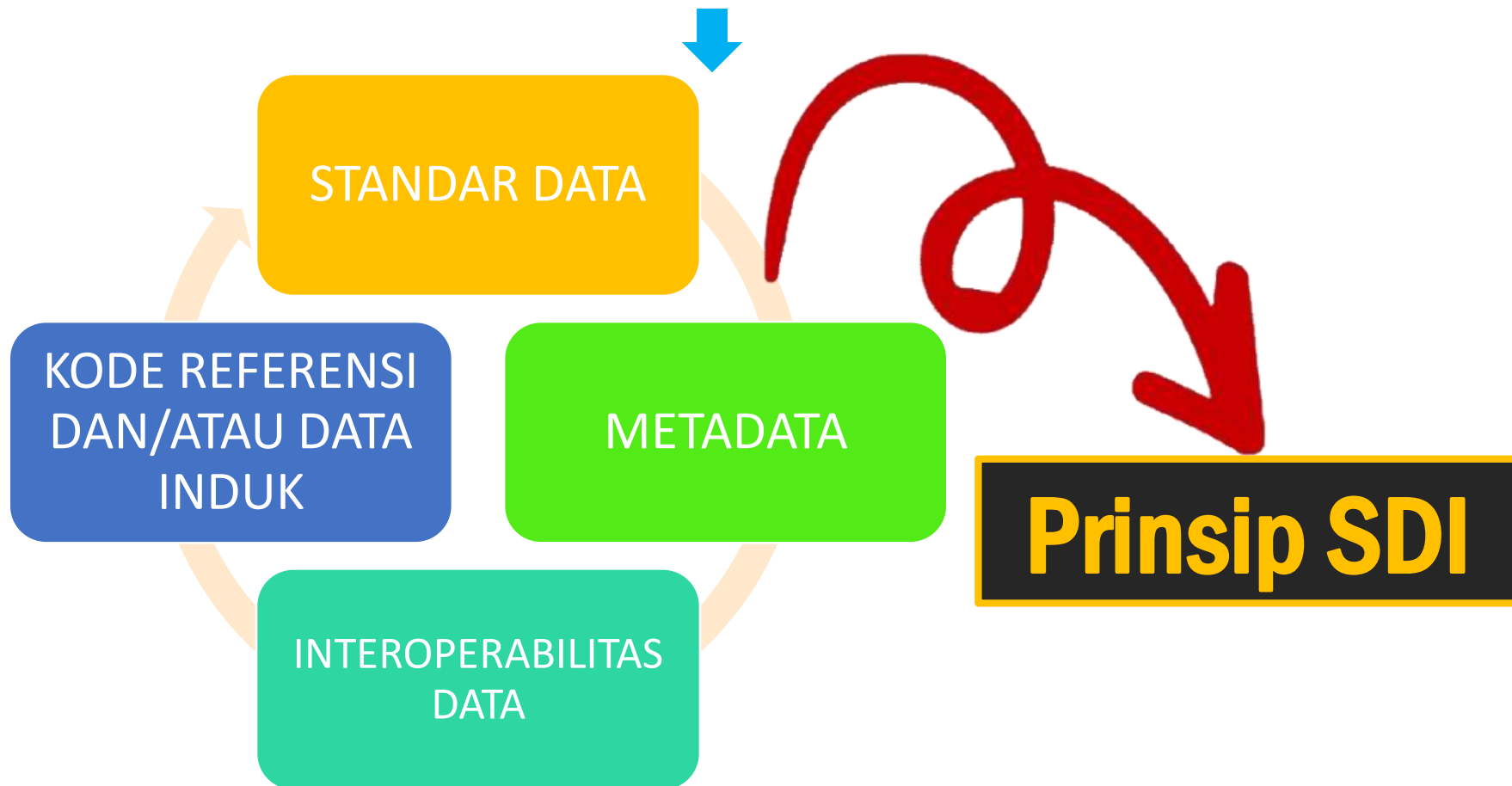
Contoh Bukti Dukung

SATU

Satu Data Indonesia (SDI)



SATU DATA INDONESIA adalah kebijakan tata Kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah

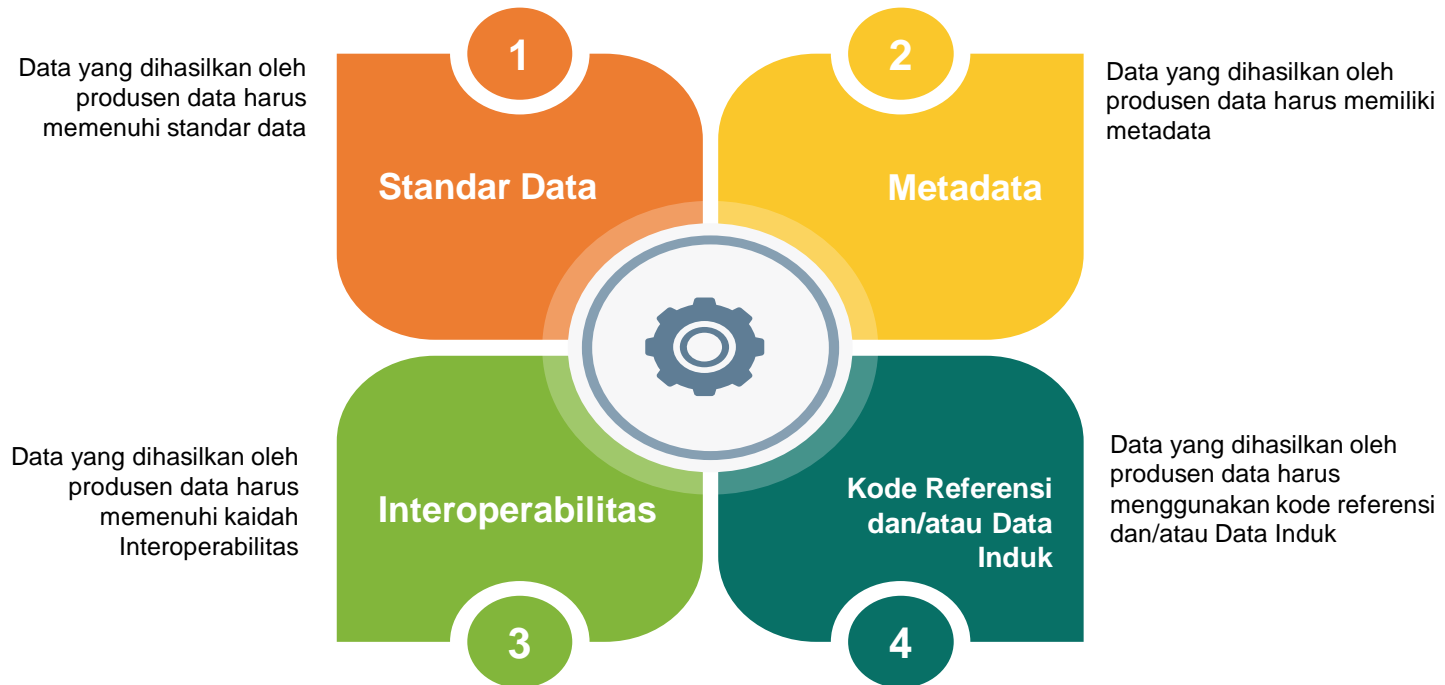


DUA

Prinsip SDI



PRINSIP SATU DATA INDONESIA



TIGA

Penyelenggara SDI



PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA



PEMBINA DATA

1. BPS
- 2. Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemda



WALIDATA

Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data



WALIDATA PENDUKUNG

Unit Kerja di instansi Daerah sesuai penugasan dari Kepala Daerah

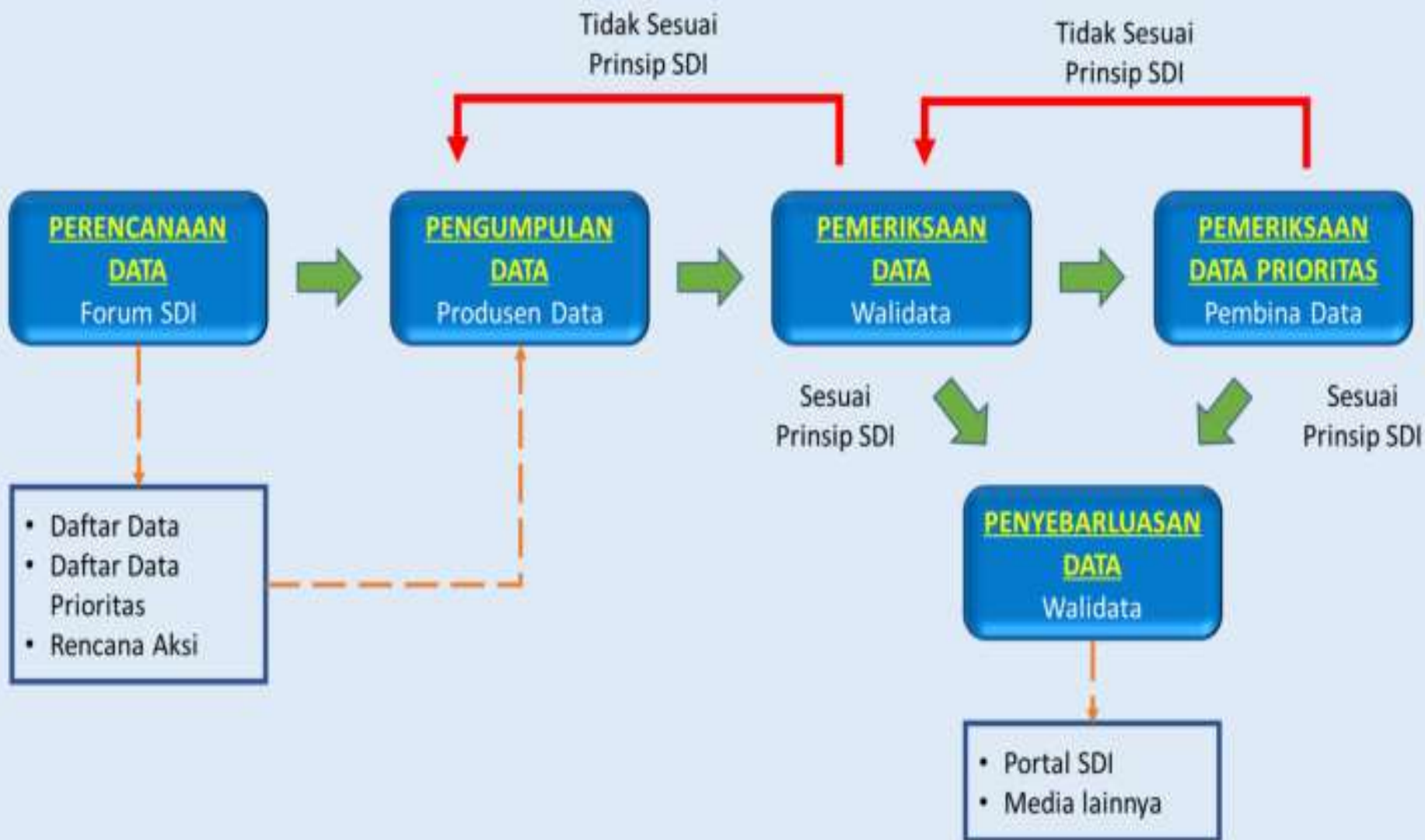


PRODUSEN DATA

Instansi Daerah yang melakukan kegiatan pengumpulan data



TAHAPAN PENYELENGGARAAN SDI



EMPAT

Indikator Kematangan Penerapan SDI



INDIKATOR KEMATANGAN PENERAPAN SDI (1)

ASPEK STANDAR DATA STATISTIK





INDIKATOR KEMATANGAN PENERAPAN SDI (2)

METADATA
KEGIATAN

METADATA
INDIKATOR

METADATA
VARIABEL

ASPEK METADATA STATISTIK

ASPEK INTEROPERABILITAS DATA

Instansi harus ada **ketentuan baku** yang mengatur **kaidah interoperabilitas** yang berlaku untuk seluruh unit kerja instansi tersebut.

ASPEK KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK

Beberapa kode referensi yang disepakati diantaranya:

NIK sebagai Referensi Tunggal Penduduk Indonesia

Bridging/relasi antar Kode Wilayah Administrasi dan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) di sig.bps.go.id

Referensi Fasyankes penyepakatan pemaduan kode referensi fasilitas kesehatan Bersama Kemenkes dan Dinas Kesehatan



TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN



LIMA

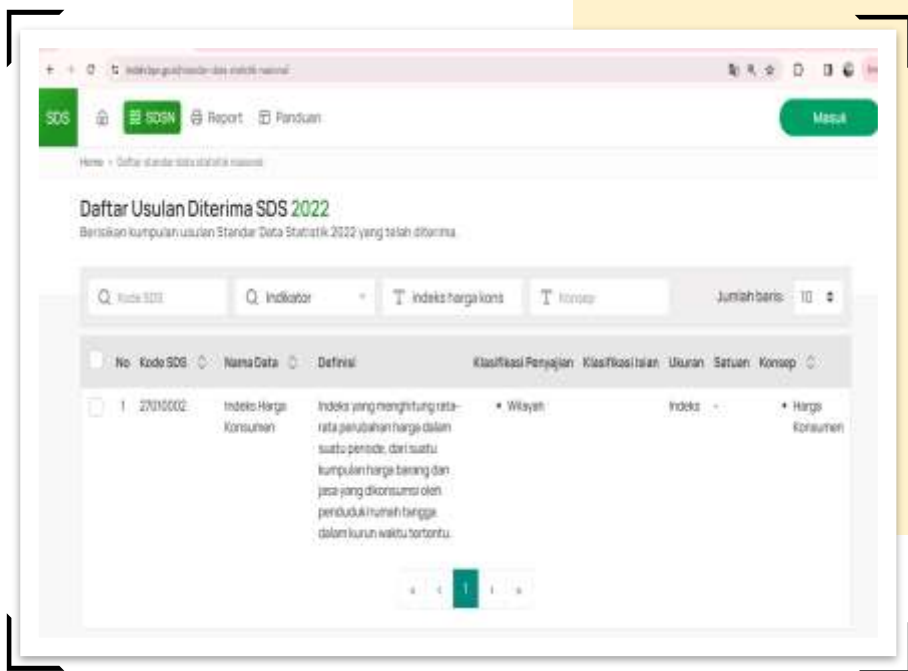
Contoh Bukti Dukung



CONTOH BUKTI DUKUNG – STANDAR DATA STATISTIK

Website INDAH BPS

- <https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional>



Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan






CONTOH BUKTI DUKUNG – METADATA



Bukti Dukung Dokumen Kebijakan
Pedoman Penyusunan Metadata
Statistik



Badan Pusat Statistik

MS-Keg

METADATA STATISTIK
KEGIATAN

Judul Kegiatan:

Survei Pemantauan Kualitas Air

Tahun: 2021

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas):

Cara Pengumpulan Data:

Pencacahan Lengkap

- 1

Kompilasi Produk Administrasi

- 3

Survei

- 2

Cara lain sesuai dengan perkembangan TI

- 4

2

Sektor Kegiatan:

Pertanian dan Perikanan

- 1

Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan

- 12

Demografi dan Kependudukan

- 2

Ketenagakerjaan

- 13

Pembangunan

- 3

Neraca Nasional

- 14

Proyeksi Ekonomi

- 4

Indikator Ekonomi Bulanan

- 15

Pendidikan dan Pelatihan

- 5

Produktivitas

- 16

Lingkungan

- 6

Harga dan Paritas Daya Beli

- 17

Keuangan

- 7

Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar

- 18

Globalisasi

- 8

Perwilayahan dan Perkotaan

- 19

Kesehatan

- 9

Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten

- 20

6

16



CONTOH BUKTI DUKUNG – INTEROPERABILITAS

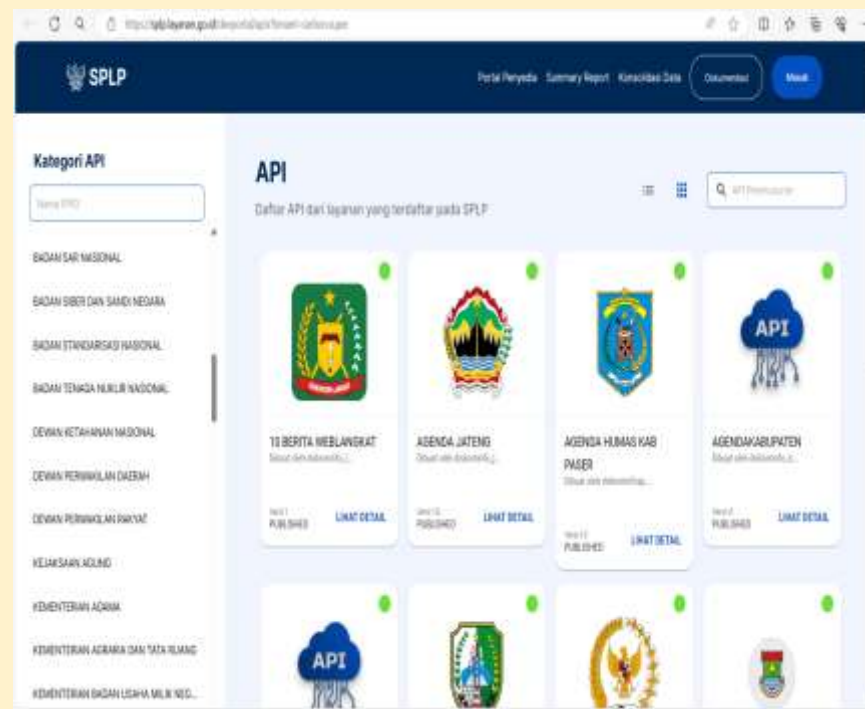
Website API BPS

<https://webapi.bps.go.id/developer/>



Web Sistem Pendukung Layanan Pemerintah

<https://splp.layanan.go.id/devportal/apis>





CONTOH BUKTI DUKUNG – REFERENSI/DATA INDUK

	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S
	daerah	no	b1	b2	b3	b7	b8	b9	b10	b11	b12	b13	b15	b16	b17
1	1100	345	2WcA099	3	4		487	2000	2	3	1		1		
2	1100	5261	dZALwQ1t	5	1	717	487	2024	2	1	1		1		
3	1100	5268	SMNK9Z9	6	1	717	487	1971	1	1	1		1		
4	1100	3131	vYPqxX_xL	85	4		487	1980	1	3	7	Pengelola	3		
5	1101	4553	EDaV1HxF	1	4		786	1984	2	1	1		1		
6	1101	27549	PJuhYeUR	2	4		786	1979	1	2	3		6		
7	1101	27817	lAqURVqiv	5	4		786	2000	1	3	3		6		
8	1101	29824	kBWdxQq	4	4		786	2001	1	3	3		6		
9	1101	31059	8euR6NDf	24	4		786	1969	2	3	7	Pegawai K	2		
10	1102	1666	wO-VTcrZ	9	4		411	1980	2	3	7	Honoror	6		
11	1102	1706	beeXjOElT	10	4		411	1999	2	3	7	Honoror	6		
12	1102	1709	lY2rGAem	11	4		411	1993	2	3	7	Pegawai h	3		
13	1102	21724	aEntHvljyg	46	4		411	1995	2	3	7	-	10	-	
14	1102	28418	5A3fcltyfn	50	4		411	1982	2	1	7	IRT	10	-	
15	1103	6053	mUADggy	1	1	757	519	1980	2	2	3		6		
16	1103	6062	xIOGxtj_8t	2	1	757	519	1989	1	3	4		8		
17	1103	6155	Do2PzOex	3	1	757	519	1986	1	1	3		3		
18	1103	6170	y2CBWp2	8	1	757	519	1994	2	3	1		1		
19	1103	7524	hJ8O21_j5	9	1	757	519	1985	1						
20	1104	10837	U-nH_BWt	6	1	814	553	2000	2						
21	1104	10844	2-gze2fD_	7	1	812	553	1975	1						
22	1104	10860	x-vglwzjtE	8	1	814	553	1986	2						
23	1104	10881	i3r3KQIPd	9	1	814	553	1947	1						
24	1104	10890	vDVfDMkr	10	1	814	553	1978	1						

Kode Relasi
Pencarian

Kode Relasi BPS dengan Kemendagri

Kode Wilayah yang diisikan adalah Kode Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) BPS dengan Kode Wilayah Administrasi Kemendagri.

Periode Wilkerstat: 2004 Sensus 1 (BPS) - 2022 (Kemendagri)

Provinsi: LAMPUNG

Kab/Kota: ---

Kecamatan: ---

Download

No	Wilayah Kerja Statistik - BPS		Wilayah Administrasi - Kemendagri	
	Nama Kabupaten / Kota	Kode Kabupaten / Kota	Nama Kabupaten / Kota	Kode Kabupaten / Kota
1	Kab. Lampung Barat	1001	Kab. Lampung Barat	1004
2	Kab. Tanggamus	1002	Kab. Tanggamus	1006
3	Kab. Lampung Selatan	1003	Kab. Lampung Selatan	1001
4	Kab. Lampung Timur	1004	Kab. Lampung Timur	1007
5	Kab. Lampung Tengah	1005	Kab. Lampung Tengah	1002

WEBSITE

<https://sig.bps.go.id/bridging-code/index>



BUKTI DUKUNG KEMATANGAN PENERAPAN PRINSIP SDI





5

TIPS STRATEGIS

- 1) Mengaktifkan Walidata Daerah serta Forum Satu Data Tanggamus
- 2) Melakukan pembinaan internal lintas perangkat daerah agar seluruh OPD memahami pentingnya SDI
- 3) **Koordinasi dengan BPS daerah untuk asistensi teknis maupun validasi SDS dan metadata**
- 4) Mengaktifkan Portal SPBE BPS Kabupaten Tanggamus untuk interoperabilitas data sektoral Kabupaten Tanggamus
- 5) Monitor dan evaluasi berkala tingkat kematangan implementasi setiap indikator SDI



DATA

Mencerdaskan Bangsa

Terima Kasih